

## Sidang Duplik Rafael Alun Digelar 2 Januari

JAKARTA (IM) - Jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK telah selesai membacakan replik terkait kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa mantan Pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo. Sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda pembacaan duplik Rafael Alun pada 2 Januari 2024.

"Kemudian Saudara ada hak untuk mengajukan duplik, Saudara diberikan waktu sampai tanggal 2, hari Selasa, untuk dibacakan dupliknya, karena nanti sekitar tanggal 4, tanggal 5, membacakan putusan, terjadwal di situ. Jadi Terdakwa kembali ke tahanan, sidang dibuka kembali nanti pada hari Selasa, 2 Januari 2024," kata hakim ketua Suparman Nyompa saat sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Jumat (29/12).

Sebelumnya, jaksa KPK meminta majelis hakim menolak nota pembelaan atau pleidoi terdakwa Rafael Alun Trisambodo. Jaksa meminta hakim tetap menghukum Rafael Alun sesuai tuntutan jaksa, yakni 14 tahun penjara. "Kami bersikap tetap pada

surat tuntutan nomor 104/TUT.01.06/24/12/2023 yang telah dibacakan pada 11 Desember 2023 dan memohon agar nota pembelaan terdakwa dan penasih hukumnya dinyatakan ditolak," kata jaksa saat membacakan replik di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (29/12).

"Selanjutnya kami penuntut umum memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana penuntut umum," tambahnya.

Jaksa menolak seluruh pembelaan Rafael Alun. Jaksa menyebut terdakwa tidak mampu membuktikan secara logis jika harta kekayaannya diperoleh dari sumber penghasilan yang sah.

"Terdakwa tidak mampu memberikan pembuktian terbalik yang logis yang membuktikan jika harta kekayaannya tersebut bersumber dari penghasilan yang sah dan patut sebagaimana profil Terdakwa," ucap jaksa. ● dot

# 2 Polhukam

FOTO: ANTARA



## UPACARA PERINGATAN HUT BAKAMLA KE-18

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksmiana Madya TNI Irvansyah (tengah) meninjau upacara peringatan HUT Bakamla ke-18 di Taman Proklamasi, Jakarta, Jumat (29/12). Acara tersebut bertema Indonesia Cost Guard yang modern dan profesional untuk Indonesia maju.

# Pemerintah Tengah Berupaya Integrasikan Digitalisasi Birokrasi

"Kita punya Perpres SPBE, punya Perpres Arsitektur SPBE, Perpres Satu Data Indonesia, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk dari sisi fondasi kebijakan. Dari fondasi tata kelolanya, kita sudah ada tim koordinasi SPBE, tim arsitektur SPBE, kemudian ada capaian di beberapa kementerian/ lembaga," kata Abdullah Azwar Anas.

JAKARTA (IM) - Pemerintah tengah berupaya menyatukan atau mengintegrasikan digitalisasi birokrasi atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dari setiap kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah di Indonesia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengemukakan hal itu usai melaporkan perkembangan digitalisasi birokrasi kepada Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat

(29/12). "Selama ini pemda punya aplikasi, kementerian a, b, c, dan d punya aplikasi sehingga izin yang dikerjakan atau urusan sesuatu sangat banyak. Nah, ke depan ini tidak lagi terjadi. Akan disatukan sehingga tidak lagi bertumpuk," kata Azwar Anas dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan, selama ini pelaksanaan SPBE sudah memiliki fondasi kebijakan maupun fondasi tata kelola. "Kita punya Perpres SPBE, punya Perpres Arsitektur SPBE, Perpres Satu Data In-

donesia, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk dari sisi fondasi kebijakan. Dari fondasi tata kelolanya, kita sudah ada tim koordinasi SPBE, tim arsitektur SPBE, kemudian ada capaian di beberapa kementerian/ lembaga," jelasnya.

Namun, kata Azwar, ada kesulitan mengintegrasikan layanan pemerintahan di kementerian/ lembaga. Oleh karena itu, Presiden menerbitkan Perpres Nomor 82 Tahun 2023 yang mengatur percepatan pelaksanaan digitalisasi.

"Isinya memperkuat tata kelola melalui keterlibatan kementerian koordinator. Jadi, para menko diperintahkan untuk 'memaksa' dalam tanda kutip kepada kementerian/ lembaga untuk mengikuti arsitektur SPBE, termasuk mendorong portal satu layanan di setiap kementerian/ lembaga," katanya.

Selain itu, penerbitan perpres juga untuk membangun kemampuan implementasi *government technology (govtech)*

atau teknologi pemerintahan dan fokus pada integrasi layanan.

Menurut Azwar, Pemerintah akan fokus di sembi layanan prioritas, yakni identitas digital dasar (digital ID seperti kartu tanda penduduk). Presiden ingin masyarakat tidak disulitkan lagi dengan urusan mencetak KTP guna memperoleh pelayanan.

Berikutnya terkait dengan platform pertukaran data, karena selama ini kementerian/ lembaga kaya akan data namun tak bertukar sehingga manfaatnya belum optimal untuk masyarakat.

Selanjutnya pembayaran digital. Saat ini, kata dia, sudah berjalan di hampir semua pemerintahan dari pusat hingga daerah.

Selain itu, pelayanan publik portal satu data. Dalam hal ini Presiden meminta portal layanan dibuat berdasarkan kebutuhan. "Misalnya, di Estonia itu langsung bagaimana

cara melahirkan, bagaimana saya menikah, bagaimana asuransi saya. Jadi, langsung ke urusan masing-masing, tidak lagi ke sektoral. Ini nanti akan dilakukan rapat kabinet paripurna oleh Bapak Presiden," terang Azwar.

Pemerintah juga akan membuat portal administrasi pemerintahan agar sistem keuangan dan sistem pemerintahan tidak terlampaui banyak. "Kemarin SIPD (sistem informasi pemerintahan daerah) sudah kita resmikan. Lebih dari 500 layanan, cukup satu layanan. Kemudian SIM online, lalu bantuan sosial atau di Kementerian Sosial, kesehatan di Kementerian Kesehatan, dan pendidikan di Kementerian Pendidikan," ujar Azwar.

Jika sembilan fokus pelayanan sudah menjadi digital, dia optimistis akan berdampak sangat besar bagi penyelenggaraan pemerintahan. ● mar



FOTO: ANI

## PEREMIKSAAN ZULFIKAR FAHMI

Tersangka kasus dugaan suap proyek peningkatkan jalur kereta Api Lampung - Cianjur Tahun 2023 - 2024 Zulfikar Fahmi (kiri) berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat (29/12). Direktur PT. Putra Kharisma Sejahtera (PKS) tersebut diperiksa sebagai tersangka dugaan menyuap mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung Syntho Pirjani Hutabarat sebesar Rp935 Juta agar mendapatkan pengerjaan proyek itu.

## Ombudsman Paparkan Temuan soal Transportasi pada 2023

JAKARTA (IM) - Ombudsman RI memaparkan sejumlah temuan dalam bidang transportasi pada 2023. Salah satu yang disorot adalah kereta cepat Whoosh.

Hal ini disampaikan dalam Catatan Akhir Tahun Ombudsman soal Pengawasan Pelayanan Publik Sektor Transportasi, Infrastruktur Jalan, dan Energi, Jumat (29/12).

Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, mengatakan beberapa masalah dalam kereta cepat adalah padamnya aliran listrik hingga kereta feeder dari Stasiun Bandung ke Stasiun KCJB Padalarang yang kerap terlambat.

"Hasil temuan tinjauan lapangan kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB), pemadaman listrik, KA feeder KCJB telat, KCJB mandek 20 menit, sistem refund belum optimal, kereta cepat Whoosh susah sinyal," ujar Hery.

Ia juga menyoroti kapasitas kereta feeder yang hanya untuk 200 orang, sementara kapasitas KCJB mencapai 601 orang. Hal ini membuat banyak penumpang yang harus berdiri. "Kapasitas maksimal hanya 200 penduduk, sementara penumpang KCJB bisa 601 orang jika terisi penuh. Penumpang yang tak dapat tempat duduk harus berdiri. Jadi ada satu pemaksaan ruang untuk melebihi kuota," tuturnya.

Selain kereta cepat, Hery menyorot permasalahan yang terjadi di Tol Cipali. Hery mengatakan pihaknya menemukan kerusakan di se-

jumlah ruas jalan Tol Cipali dan kurangnya beberapa fasilitas di rest area.

"Berdasarkan dashboard pemenuhan SPM BPJT, yang dilakukan BPJT tiap 6 bulan, tingkat pemenuhan SPM Tol Cipali mencapai 100 persen. Namun Tim Ombudsman masih menemukan ruas titik jalan yang mengalami kerusakan di Tol Cipali, di antaranya di ruas jalan Km 89, 90, 93, 94, 97, 98, 102 dan 108 arah Palimanan," tuturnya.

"Hasil lain yang menjadi temuan Tim Ombudsman adalah toilet disabilitas yang terkunci, tulisan nomor pengaduan dalam banner bebas parkir yang hilang, kondisi pintu toilet beberapa ada yang rusak, kondisi ruang ibu menyusui dan kondisi ruang kesehatan yang tidak layak yang sekiranya perlu ditingkatkan pelayanannya," sambungnya.

Oleh sebab itu, Ombudsman meminta agar pengelola Tol Cipali melakukan perbaikan di beberapa rest area. Dia juga meminta agar dilakukan perbaikan dan inovasi demi menurunkan angka kecelakaan di Tol Cipali.

"Mendorong pihak pengelola Tol Cipali terus melakukan inovasi dan perbaikan dari semua aspek untuk menurunkan angka kecelakaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara yang baik," ujarnya. ● hen

## Ganjar Gagas Program SMK Gratis ke Tingkat Nasional

WONOGIRI (IM) - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkomitmen untuk mengaggas program sekolah menengah kejuruan atau SMK gratis untuk keluarga tidak mampu ke tingkat nasional guna mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Sebelumnya, Ganjar telah menjalankan program serupa melalui SMKN Jawa Tengah semasa menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

"Jadi, setelah kita lihat praktik yang sudah berjalan di SMKN Jateng untuk keluarga miskin dan mereka langsung bisa bekerja maka Ganjar-Mahfud berkeinginan untuk menjadikan program itu bisa kita kembangkan secara nasional," kata Ganjar usai menghadiri acara "Launching SMK Gratis Langsung Kerja untuk Ke-

luarga Miskin" di Lapangan Pule, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, dikutip dari Antara, Jumat (29/12).

Menurut Ganjar, jika program tersebut dimulai di setiap kabupaten/kota di Indonesia maka langkah tersebut secara sistematis dapat mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kualitas SDM dalam negeri.

"Kalau kita mulai tahun pertama di setiap kabupaten/kota yang bisa menyerap keluarga miskin maka Insyaallah ini akan menjadi program yang secara sistematis bisa mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kualitas SDM kita," ujarnya.

Ganjar menerangkan akan menjadikan program tersebut sebagai prioritas karena lapangan pekerjaan masih dibutuhkan oleh generasi muda. Selain itu, realisasi program tersebut tidak mustahil karena telah dipraktikkan

sebelumnya.

"Kalau bisa kita desain dari awal pendidikannya, terus bisa langsung bertemu dengan industrinya, di-bridging (dijembatani) oleh pemerintah maka sekolah SMK gratis langsung kerja bukan cerita mustahil karena sudah dipraktikkan," terangnya.

Pihaknya telah memperhitungkan anggaran yang akan digelontorkan untuk program tersebut, yaitu sekitar Rp50 triliun. Nantinya pada setiap kabupaten/kota setidaknya terdapat satu SMK gratis.

"Kita bisa mengonversi, kalau tidak membuat yang baru. Kami mengonversi beberapa SMK untuk dijadikan SMK gratis bagi keluarga miskin itu hanya dengan satu kebijakan, yang itu dikonversi selesai sehingga dari sisi anggaran tidak terlalu mahal dan ini menurut saya jauh lebih berguna," jelasnya. ● mar



FOTO: ANI

## IMIGRASI GORONTALO TAHAN WNA INDIA

Petugas menggiring warga negara asing (WNA) asal India berinisial WR (kanan) di kantor Imigrasi Kelas 1 Gorontalo di Kota Gorontalo, Jumat (29/12). WR ditahan karena tidak memiliki izin tinggal yang sah sejak 12 Februari 2023 atau overstay dan memiliki istri siri dan tinggal di rumah kos di Kota Gorontalo.

**PENGUMUMAN**  
Dalam RUPS PT. GUANGBO INTERNATIONAL BISNIS, yang Berita Acaranya dibuat dgn akta tertg 22 Desember 2023 No. 24, dibuat di hadapan Jerry Valentina Andriana, S.H.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, telah diputuskan sebagai berikut:  
- Menyetujui pengurangan Modal Dasar Perseroan dari Rp. 11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah) menjadi Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan Modal Setor Perseroan dari Rp. 11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah) menjadi Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Atas pengurangan Modal Dasar dan Modal Setor Perseroan, maka menyetujui untuk merubah Pasal 4 ayat 1 & 2 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan perubahan tersebut. Demikian hasil RUPS-LB ini diberitahukan untuk diketahui.  
Jakarta, 30 Desember 2023  
Direksi  
PT. GUANGBO INTERNATIONAL BISNIS

**PENGUMUMAN PEMBUBARAN PERSEROAN PT. GUIDE WISATA TEKNOLOGI INDONESIA (dalam Likuidasi)**  
Berdasarkan Akta Pemutusan Hubungan Kerja dan Pembubaran Perseroan Nomor 11 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Lestariani, S.H.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Bandung, seluruh pemegang saham perseroan telah memutuskan dan menyetujui :  
\* Untuk membubarkan Perseroan berlaku sejak tanggal 14 Desember 2023  
\* Mengangkat Direktur Utama Perseroan Tuan MICHAEL KRISTIANITO untuk bertindak selaku Likuidator Perseroan.  
Sebagai Kebutuhan Pasal 147 UUPJ diberitahukan kepada seluruh pemegang Saham Perseroan. Agar dalam jangka waktu 60 hari sejak pengumuman ini untuk mengajukan tagihannya secara tertulis kepada Likuidator di kantor perseroan : Jl. Merdeka Utara No.1 Dusun Kilwon, Kab. Cirebon, Jawa Barat  
Likuidator  
PT. GUIDE WISATA TEKNOLOGI INDONESIA (dalam Likuidasi)